



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500; Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-51/PB.6/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April - November Tahun 2025

16 Mei 2025

Yth. Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Keuangan dan BMN/Kepala Pusat Keuangan/ Kepala Puslapbinkuhan/Direktur Keuangan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga
Sebagaimana Lampiran I

Sehubungan dengan ketentuan pada Bab V Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan, dilakukan rekonsiliasi yang meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.
2. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilaksanakan melalui Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id> atau aplikasi lain yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan memedomani **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.**
3. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode April sampai dengan November 2025 dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

Periode	Penyelesaian TDK	Penyelesaian To Do List Pelaporan	Penutupan Permanen	Batas Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi	TMT Pengenaan Sanksi
April 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	16 Mei – 15 Juni 2025	15 Juni 2025	16 Juni 2025
Mei 2025	16 Mei – 30 Juni 2025	16 Mei – 30 Juni 2025	16 – 30 Juni 2025	30 Juni 2025	1 Juli 2025
Juni – November 2025	Sesuai PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga				

4. Satuan Kerja agar memantau status hasil rekonsiliasi eksternal secara berkala melalui Aplikasi MonSAKTI dan menyelesaikan sampai dengan terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR akan diterbitkan dalam hal:
 - a. Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA, atau terdapat TDK namun mendapat persetujuan KPPN berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Tidak terdapat To Do List Pelaporan sesuai dengan periodisasi penyelesaiannya; dan
 - c. Sudah tutup permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan pada periode rekonsiliasi berkenaan.

5. Terhadap Satuan Kerja yang mengalami likuidasi pada tahun 2025, agar segera menyelesaikan hak dan kewajiban dengan memedomani pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Satuan Kerja dikecualikan dari kewajiban rekonsiliasi apabila seluruh pagu DIPAny telah direvisi menjadi nol dan belum terdapat transaksi atau realisasi atas DIPA tersebut.
7. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B-E1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
8. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait hal-hal di atas maupun penggunaan Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI, dapat disampaikan melalui Layanan *Helpdesk* HAI DJPb pada laman <https://hai.kemenkeu.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



**DAFTAR KEPALA BIRO KEUANGAN/KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN/KEPALA
PUSAT KEUANGAN/ KEPALA PUSLABBINKUHAN/DIREKTUR KEUANGAN/KEPALA BIRO
PERENCANAAN/KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN/KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KINERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum RI
14.	Kementerian Hak Asasi Manusia RI
15.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
16.	Kementerian Keuangan RI
17.	Kementerian Pertanian RI
18.	Kementerian Perindustrian RI
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
20.	Kementerian Perhubungan RI
21.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
22.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
23.	Kementerian Kebudayaan
24.	Kementerian Kesehatan RI
25.	Kementerian Agama RI
26.	Badan Penyelenggara Haji
27.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
29.	Kementerian Sosial RI
30.	Kementerian Kehutanan RI
31.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI
32.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
33.	Kementerian Pekerjaan Umum RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
34.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
35.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
36.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
38.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI
39.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI
40.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah RI
41.	Kementerian Pariwisata RI
42.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
43.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
44.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
45.	Kementerian Koperasi RI
46.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI
47.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
48.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI
49.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
50.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
51.	Badan Intelijen Negara
52.	Badan Siber dan Sandi Negara
53.	Dewan Ketahanan Nasional
54.	Badan Pusat Statistik
55.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
56.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
57.	Perpustakaan Nasional
58.	Kementerian Komunikasi dan Digital RI
59.	Kepolisian Negara RI
60.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
61.	Lembaga Ketahanan Nasional
62.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
63.	Badan Narkotika Nasional
64.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
65.	Kementerian Transmigrasi RI
66.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
67.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
68.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
69.	Komisi Pemilihan Umum

No.	Kementerian Negara/Lembaga
70.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
71.	Badan Informasi Geospasial
72.	Badan Standardisasi Nasional
73.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
74.	Lembaga Administrasi Negara
75.	Arsip Nasional RI
76.	Badan Kepegawaian Negara
77.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
78.	Kementerian Perdagangan RI
79.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
80.	Komisi Pemberantasan Korupsi
81.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
82.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
83.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
84.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
85.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
86.	Ombudsman RI
87.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
88.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
89.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
90.	Badan Pengawas Pemilu
91.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
92.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
93.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
94.	Badan Keamanan Laut
95.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
96.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
97.	Badan Pangan Nasional
98.	Otorita Ibu Kota Nusantara
99.	Badan Karantina Indonesia
100.	Badan Gizi Nasional